

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena setiap bangsa berhak mendapatkan dan merasakan kehidupan yang bebas dan terlepas dari intervensi pihak luar dalam urusan kenegaraannya. Namun, suatu bangsa belum dapat dikatakan merdeka apabila masih terdapat wilayah-wilayah yang menuntut untuk memisahkan diri dari kesatuan negara, inilah yang terjadi di Indonesia, pasca kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno. Selanjutnya Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan kenegaraannya dan mengalami masa-masa transisi yang menyebabkan belum stabilnya keadaan sosial, politik, ekonomi dan pemerintahan.

Babak baru dalam perjalanan politik Indonesia pasca merdeka menuai berbagai persoalan, salah satu hal yang sangat mengganggu stabilitas negara adalah adanya gerakan-gerakan separatis. Gerakan-gerakan ini muncul dikarenakan adanya ketidakselarasan keinginan antara rakyat di suatu daerah dengan pemerintah pusat. Melihat fenomena ini tentunya pemerintah pusat perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi gerakan-gerakan yang dianggap sebagai penyebab ketidakstabilan nasional.

Gerakan separatis dapat diartikan sebagai gerakan untuk memisahkan diri dari sebuah satu kesatuan yang sering kali menyebabkan konflik dengan konsekuensi merugikan semua pihak yang terlibat. Salah satu gerakan yang menyita perhatian banyak pihak baik nasional maupun internasional dan dianggap sebagai gerakan separatis adalah gerakan yang berpusat di Provinsi Aceh dan menamakan diri dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka kemudian mengalami konflik dengan pemerintah pusat Indonesia.

Aceh adalah salah satu daerah terkuat basis pertahanannya di Indonesia, dapat dilihat dari sejarah panjang tentang perjuangan Aceh pada masa penjajahan Belanda dapat dikatakan sebagai bukti nyata dari *faith accomplie* para pejabat pemerintah sejak Soekarno sampai Soeharto. Salah satu indikatornya adalah ketika daerah lain dapat ditaklukan oleh Belanda, maka Aceh adalah Kerajaan yang tidak pernah mau tunduk pada Belanda juga Jepang, meskipun Belanda dan Jepang

Eka Auliana Pratiwi, 2019

CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA GERAKAN ACEH MERDEKA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA 2005-2012

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sempat menduduki Aceh, mereka tidak pernah bisa merasa tenang dan aman meski hampir setengah dari populasi rakyat Aceh dibantai oleh pasukan Marsose, yaitu pasukan khusus Belanda yang terkenal sangat ganas. Belanda yang saat itu membunuh dan menyiksa tanpa mengenal Hak Asasi Manusia tidak sanggup menundukan rakyat Aceh secara utuh.

Perang Aceh dimulai pada 26 Maret 1873, saat itu Belanda memaklumkan perang terhadap Kerajaan Aceh. Sejak saat itu Belanda berupaya menundukan Aceh meskipun sangat sukar, hingga akhirnya Belanda mengirimkan utusannya yaitu Snouck Hourgronje untuk mendalami agama Islam di Arab dan diharapkan dengan pengetahuannya dapat menundukan rakyat Aceh, meskipun demikian upaya Belanda belum berhasil secara sempurna untuk menguasai daerah Aceh secara utuh hingga perang dunia kedua. Aceh juga merupakan basis Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada saat seluruh wilayah RI dikuasai oleh Belanda dan Presiden beserta wakilnya ditawan oleh Belanda.

Kokohnya pertahanan Aceh mendapatkan apresiasi dari presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno dengan memberikan janji bahwa Aceh akan dijadikan sebagai daerah Istimewa. Beliau menjanjikan kepada Teungku Muhammad Daud Beureuh, seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati oleh masyarakat Aceh dan juga menjabat sebagai Gubernur Militer dengan pangkat Mayor Jendral. Akan tetapi, janji manis yang terucap diawal justru membuahkan kekecewaan. Janji yang disampaikan oleh presiden tersebut pada saat kunjungannya ke Aceh menghasilkan dua pesawat Seulawah, tetapi yang dibeli hanya 1 unit saja padahal bisa dibeli lebih dari 2 unit. Belakangan diberitakan kalau uang tersebut dikorupsi oleh seorang perwira TJR/TNI di Sumatera yang orangnya telah meninggal, pernyataan ini diungkapkan oleh Ali dalam (Syafiie& Azhari, 2009, Hlm. 135).

Keterangan yang didapat dari Daud Beureuh adalah presiden menyanggupi untuk membeli beberapa unit pesawat untuk RI dari hasil penggalangan dana yang dikenal dengan istilah pinjaman nasional, yaitu sejumlah harta benda yang dihibahkan oleh masyarakat Aceh kepada RI untuk membeli pesawat terbang. Tetapi ketika Bung Karno diminta untuk membuat janji secara tertulis, justru Bung Karno terlihat sedih dan terharu hingga mengeluarkan air mata dan berkata “Apalah gunanya saya menjadi presiden jika perkataannya tidak dapat dipegang”. Melihat

hal tersebut, Daud Beureuh tidak mendesak lagi, tinggal menunggu janji saja.

Realisasi dari janji presiden tidak kunjung kesampaian, justru yang terjadi adalah kebalikan dari janji manis itu. Aceh dijadikan sebagai salah satu kabupaten yang berada di bawah provinsi Sumatera Utara. Hal ini membuat rakyat Aceh marah, keadaan ini memaksa Daud Beureuh yang telah terlanjur mengabarkan kepada rakyatnya tentang janji presiden merasa malu dan bersalah, pasalnya beliau adalah tokoh masyarakat. Daud Beureuh kemudian melakukan langkah sebagai penebus rasa bersalahnya dengan melakukan perlawanan dengan memilih masuk hutan dan memimpin pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di Aceh.

Perlawanan yang dilakukan oleh Daud Beureuh dikatakan setengah hati oleh pengamat. Pasalnya setelah kedatangan Wakil Perdana Menteri Mr.Hardi dan mengeluarkan keputusan Wakil Perdana Menteri No.1/Missi/1959 yang mengatur bahwa Aceh sebagai Daerah Istimewa dalam hal agama, adat istiadat, dan budaya maka pemberontakan pun berakhir dengan sendirinya.Keistimewaan sebagaimana yang telah diberikan lewat Missi Hardi tersebut tidak pernah dijalankan, ketika Pemerintah Aceh mengharapkan adanya pelaksanaan dari hasil putusan tersebut, maka dengan berbagai alasan pemerintah pusat justru menolak.

Hingga memasuki masa Orde Baru yang mengeluarkan UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah mengenai latar belakang pembentukannya, hubungan kewenangan, keuangan dan pengawasan serta implikasinya bagi daerah-daerah di Indonesia. Penyusunan dari UU ini awalnya dimaksudkan sebagai upaya untuk menghilangkan segala bentuk keistimewaan. Setelah melewati perdebatan yang panjang, maka Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh tetap diakui. Letak keistimewaan DIY berada pada Sultan dan KGPA Pakualam menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka keistimewaan bagi Aceh hanyalah sebuah nama tanpa isi karena dalam pelaksanaannya Aceh masih harus melaksanakan setiap aturan tanpa ada perbedaan dengan daerah lain dalam hal apapun, termasuk menjalankan syariat Agama Islam yang bagi rakyat Aceh sudah mendarah daging.

Kekesalan rakyat Aceh semakin menjadi-jadi ketika menyaksikan lahan gas dan minyak semakin menguntungkan pusat, yaitu Jakarta. Sementara di lain pihak, rakyat Aceh yang lebih dekat dengan sumber kekayaan Alam Aceh itu justru tidak mendapatkan apa-apa.

Pemberontakan pun meletus dan disebut sebagai GAM generasi kedua, yang konon menurut laporan Gubernur Aceh Teuku Abdullah Hasan lebih berbahaya bagi rakyat daripada GAM generasi sebelumnya. Informasi tersebut kemudian sampai ke pusat dan Presiden yang berkuasa saat itu, Presiden Soeharto menempatkan personel militer tambahan di Aceh dan menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Pemberontakan GAM generasi kedua ini dipimpin oleh Hasan Tiro, seorang doktor yang sebelumnya adalah pegawai kedutaan besar Indonesia di PBB. Hasan Tiro juga disebut sebagai Presiden GAM, pada tahun 1956 menulis sebuah buku yang berjudul “*Demokrasi Untuk Indonesia*”. Dalam bukunya, Hasan Tiro menuangkan buah pikirannya. Dalam banyak hal, pemikiran Hasan Tiro dalam buku tersebut patut didiskusikan, meskipun terdapat beberapa benih-benih kebencian penulis terhadap Jakarta dan Jawa yang mulai tampak dan kemudian benih itu menjadi dasar dalam menyuarakan keinginan mereka secara oleh generasi muda yang tergabung dalam Angkatan GAM. Buku Hasan Tiro kemudian menjadi buku hitam yang baru boleh dibaca secara bebas setelah Soeharto Lengser Keprabon.

GAM pada masa Orde Baru dideklarasikan oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976. Konflik yang terjadi antara GAM dengan pemerintah pusat memang terjadi cukup lama, dalam hal ini pemerintah pusat mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik ini, baik dengan cara militer maupun dengan cara berunding atau diplomasi. Dalam perkembangannya, terutama sejak 1970-an hingga 1990-an, wilayah Aceh terus mengalami pergolakan dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya.

Fenomena GAM yang muncul sebelum operasi jaring merah atau lebih dikenal dengan akronim DOM (Daerah Operasi Militer) pada Juli 1990 kemudian muncul kembali pasca DOM 1998 menunjukkan bahwa permasalahan Aceh memang belum selesai. Eskalasi Masalah bahkan nampak di tahun-tahun terakhir, terutama karena kemunculan Anggota Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) sebagai sayap militer GAM yang melakukan perjuangan melalui gerakan bersenjata yang pasti militeristik dan represif (Djali, 2002, Hlm. 45).

Latar belakang munculnya GAM adalah adanya ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat yang dianggap berlaku tidak adil terhadap rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam

bidang ekonomi. Sumber daya alam Aceh dieksploitasi secara besar-besaran namun tidak ada pembagian yang proporsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Aceh, tentunya hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah dan pusat, fenomena ini seolah-olah menandakan pemerintah pilih kasih dalam hal pembangunan, lebih mengutamakan pembangunan di Pusat daripada di daerah-daerah terjauh dan terluar. Maka dari itu, sumber daya alam Aceh yang melimpah tidak dapat dijadikan jaminan untuk membuat hidup rakyat Aceh lebih sejahtera.

Pemberontakan GAM ini juga dibangun dengan landasan ideologi nasionalis ke-Aceh-an yang dibangun oleh Hasan Tiro. Keyakinan Hasan Tiro dengan sejarah kejayaan Aceh di masa lampau untuk berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat (Nasruddin, 2014, Hlm. 4). Aceh bersimbah darah bukanlah omong kosong semata, sejak 1873 Aceh belum merasakan kedamaian yang utuh. Seorang wakil rakyat yang berasal dari Aceh, Gazali Adnan Abbas menyuarakan keadaan Aceh yang sangat memperhatikan dalam sidang tahunan MPR-RI pada 3 November 2001.

Adnan Abbas meminta kepada Presiden Megawati yang hadir dalam sidang paripurna tersebut untuk memperhatikan masalah Aceh yang masih bersimbah darah. Setelah menyuarakan pendapatnya, sebagian Anggota Dewan yang hadir terlihat mengejek dan menghambat upaya tersebut, menurut mereka masih banyak hal lain yang lebih penting ketimbang masalah Aceh, memang benar, akan tetapi memberikan kesempatan sejenak terhadap suara rakyat Aceh untuk mengadukan nasibnya kepada saudara-saudaranya sebangsa setanah air di tempat yang memang semestinya perlu mendapatkan perhatian. Akan tetapi, yang didapat adalah cemoohan dari sebagian anggota yang hadir. Sikap tersebut tentunya menjadi motor penggerak perpecahan bangsa yang katanya sedang diantisipasi oleh wakil rakyat yang terhormat.

Timbulnya prasangka-prasangka yang disebabkan oleh perlakuan yang tidak pantas tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti : Apakah perlakuan tersebut tidak membuat rakyat Aceh merasa dibiarkan dan diacuhkan oleh saudara-saudaranya? Bukankan MPR mengaku dan diakui sebagai cerminan dari seluruh rakyat Indonesia, bila demikian rakyat Aceh wajar mengatakan bahwa mereka kini tinggal sendiri, maka buat apa menyatu serumah dengan saudara kalau mereka tidak memperhatikan kita dengan baik (Syafiie & Azhari, 2009. Hlm. 137).

Harapan sebagian besar rakyat Indonesia masih terus menginginkan Aceh tetap berada dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tengku Hasan Tiro dalam (Syafie& Azhari, 2009, Hlm. 138) mengatakan bahwa :

“... Indonesia adalah satu bangsa dimana ratap tangis satu golongan menjadi tertawaan golongan lain; di mana orang-orang yang dianggap pahlawan oleh satu golongan dianggap penghianat oleh golongan lainnya; di mana kekejaman terhadap satu golongan dipandang keadilan oleh golongan lain; “solidaritas nasional” hanya ada di bibir dan di poster-poster saja...”

Pernyataan Tengku Hasan Tiro bukan hanya sebatas ucap saja, tidak bisa diabaikan juga kebenarannya, tetapi juga dapat di generalisasi kebenarannya. Masalahnya adalah selama Indonesia merdeka hampir tidak pernah diperoleh kebebasan untuk mengakses informasi yang benar. Kebenaran adalah apa yang dikatakan oleh pemerintah, selain itu tidak ada kebenaran lagi. Penyebaran informasi yang bertentangan dengan apa yang di informasikan oleh pemerintah bukan hanya dikatakan sebagai penyebar informasi salah atau tukang fitnah, tetapi penyebar informasi juga akan dikatakan sebagai pemberontak atau kaum ekstrimis yang harus ditangkap. Menulis kebenaran yang tidak sesuai dengan kemauan pemerintah adalah pelanggaran, sebagai contoh buku yang ditulis oleh Tengku Hasan Tiro baru bisa diakses dan dibaca oleh rakyat Indonesia baru dimulai pada tahun 1999, padahal buku itu sudah ada sejak 1956.

Aceh adalah potret buram berbagai ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang cukup parah dalam sejarah Indonesia. Berbagai tindak kekerasan yang mengatasnamakan berbagai operasi dan misi dari berbagai pihak yang berkompetisi memperebutkan berbagai hal, baik dari segi politik, ekonomi, budaya dan ke-nasionalisme-an yang pada dasarnya bisa dicapai dengan pendekatan kultural dan dialogal telah terjadi sejak awal Indonesia merdeka. Pada dasarnya, konflik Aceh merupakan dasar dari akumulasi ketidakadilan dan peristiwa-peristiwa ideologi-politik yang telah terjadi sejak awal kemerdekaan sampai orde sekarang ini (Adan, 2003, hlm.5).

Pemerintah pusat tidak tinggal diam dalam menyikapi konflik ini. Berbagai cara telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini, konflik yang berkepanjangan juga tentunya berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional. Jalur yang ditempuh pemerintah dalam menangani

konflik ini adalah melalui jalur kekerasan dengan menempatkan kekuatan militer di Aceh untuk meminimalisir pergerakan GAM dan menumpas akar gerakan tersebut, cara lain yang ditempuh adalah melalui pendekatan politik.

Pendekatan politik yang ditempuh oleh pemerintah untuk meredam gejolak yang ada di Aceh adalah dengan menempatkan pejabat-pejabat baik sipil maupun militer untuk menduduki posisi-posisi strategis di wilayah Aceh. Operasi ini kemudian memuluskan jalan bagi operasi bersenjata di Aceh yang kemudian dikenal dengan operasi DOM (Daerah Operasi Militer) selama sepuluh tahun. Dari operasi inilah kemudian muncul pelanggaran HAM berat dan menyisakan rasa sakit hati yang mendalam di negeri yang tidak pernah menuai rasa aman itu (Adan, 2003, Hlm.6).

Kondisi Aceh ketika itu sangat dilematis, penyebabnya adalah adanya konflik yang memilukan antara GAM dan Pemerintah Indonesia. Keadaan dilematis ini terjadi karena didudukannya posisi rakyat pada dua posisi yang justru harus dibayar mahal oleh rakyat sendiri. Di satu pihak, rakyat harus membantu, baik dari segi finansial maupun material serta fisik kepada pihak GAM. Di lain pihak, jika rakyat berpihak kepada pemerintah Indonesia, maka akan dijadikan sasaran penganiayaan dan pembunuhan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang dapat dijadikan jalan keluar dengan tidak mengorbankan rakyat Aceh untuk kesekian kalinya.

Upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik melalui jalur militer mengalami kegagalan, hal ini disebabkan oleh perlawanan kembali yang dilakukan oleh GAM. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk menundukkan masyarakat Aceh maupun gerakan-gerakannya dengan jalan militer, rakyat Aceh memiliki semangat perang *fisabilillah* untuk memukul mundur lawannya, rakyat Aceh juga dikenal sebagai rakyat yang pantang menyerah dalam mempertahankan apa yang menurut mereka benar, apabila dilakukan *flashback* tentang bagaimana rakyat Aceh mampu mempertahankan wilayahnya terhadap serbuan-serbuan kaum penjajah, kita dapat melihat bagaimana gigihnya rakyat Aceh dan kemudian Aceh menjadi provinsi yang paling akhir jatuh ke tangan kolonial Belanda.

Tidak heran Aceh mendapat sorotan dunia Internasional perihal perjuangan rakyatnya mempertahankan kedaulatan dan marwah rakyat Aceh sendiri. Pemerintah Indonesia kemudian menyadari bahwa

penyelesaian konflik melalui jalan militer dalam mengatasi permasalahan konflik antara GAM dengan pemerintah pusat tidak efektif, maka jalur lain yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan melakukan dialog dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kepada rakyat Aceh dan petinggi-petinggi GAM. Cara baru yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut setidaknya memunculkan harapan baru ditemukannya sebuah penyelesaian konflik yang tepat bagi semua pihak.

Penyelesaian konflik dengan cara baru ini memanfaatkan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator, hal ini ditempuh sebagai upaya untuk mencari kesepakatan politik kedua belah pihak, cara ini dianggap menjadi lebih elegan untuk pemerintah pusat maupun masyarakat Aceh sendiri. Djumala (2013, Hlm. 23) menjelaskan bahwa :

“Ketersediaan pusat untuk berdialog dan berunding merupakan penghargaan atas martabat rakyat Aceh. Cara-cara penyelesaian konflik secara bermartabat inilah kiranya yang memungkinkan Aceh bersedia untuk berunding, sehingga konflik dapat diselesaikan”.

Apabila dilihat sekilas bagaimana kebijakan yang diterapkan pada masa Orde Baru, Orde Lama dan Reformasi dimana seringkali terjadi pergantian presiden, tentunya hal ini juga akan berpengaruh terhadap kebijakan penanganan konflik Aceh. Namun, segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat seringkali mengalami kegagalan dan ditemukan ketidaksesuaian antara keinginan, harapan dengan kenyataan dari kedua belah pihak. Penanganan konflik yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada masa Orde Lama, Orde Baru dan penanganan konflik oleh pusat pada masa Reformasi terlihat perbedaan yang cukup signifikan.

Penanganan konflik pada masa Reformasi menggunakan pendekatan secara damai dengan melakukan dialog untuk menghentikan kekerasan atau dikenal dengan cara *soft power*, berbeda dengan penanganan pada masa Orde Baru yang cenderung menggunakan kekuatan militer atau dikenal dengan istilah *hard power*. Perubahan pola penanganan konflik Aceh pasca Orde Baru yaitu setelah lengsernya presiden Soeharto mulai memperlihatkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam penanganan konflik, Djumala (2013, hlm. 23) menjelaskan bahwa :

“Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) Jenderal Wiranto berusaha untuk meraih kembali kepercayaan

publik dengan mencabut daerah operasi militer (DOM) di Aceh 7 Agustus 1998. Di samping pencabutan status DOM Jenderal Wiranto juga meminta maaf atas perilaku individu TNI semasa DOM. Tidak hanya Wiranto, Habibie pun ketika berkunjung ke Aceh pada Maret 1999 juga meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh aparat keamanan”.

Penghapusan status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer oleh Panglima TNI Wiranto memberikan harapan baru kepada rakyat Aceh. Pemerintah pusat kemudian berusaha untuk memperbaiki hubungan baik dengan rakyat Aceh berikut petinggi-petingginya dan menyudahi konflik yang sudah berkepanjangan, cara penyelesaian konflik secara damai ini kemudian mendapatkan bantuan dari suatu lembaga yang berperan sebagai mediator, yaitu pertama kali menggunakan jasa *Henry Dunant Centre* atau HDC. Keterlibatan dari HDC dalam upaya penyelesaian konflik memberikan kemajuan-kemajuan berupa pendekatan antara kedua belah pihak.

Pasca keterlibatan HDC dalam penyelesaian konflik tersebut, kedamaian yang dirasakan pasca konflik ternyata tidak berlangsung lama. HDC dianggap belum mampu mendamaikan kedua belah pihak secara menyeluruh bahkan dianggap gagal. Selanjutnya, *Crisis Management Initiative* yang diketuai oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari ditunjuk untuk menjadi pihak ketiga dalam proses perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Indonesia.

Pemerintah pusat kemudian duduk bersama dan berunding dengan pihak GAM, ternyata hal ini mendapat sorotan dari protokoler, ketika itu pemerintah Indonesia seolah-olah memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan GAM. Padahalsebenarnya sudah jelas bahwa Indonesia adalah sebuah negara berdaulat dan diakui oleh dunia Internasional, berbeda halnya dengan GAM yang dianggap hanya sebagai gerakan separatis yang muncul di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kedua pihak tersebut duduk bersama, maka secara tidak langsung antara Pemerintah Indonesia dengan GAM seolah-olah memiliki kesamaan dan kesetaraan di dalam pemerintahan.

Proses perdamaian yang melibatkan *Crisis Management Initiative* tidaklah berjalan mulus, bahkan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat umum dan juga pemerintah Indonesia. Pro dan kontra yang muncul di masyarakat umum adalah mengenai penggunaan pihak ketiga (mediator) dalam menyelesaikan konflik pemerintah Indonesia dengan

GAM, hal ini membuat keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena adanya campur tangan pihak asing dalam menangani masalah internal Indonesia dan tidak menutup kemungkinan akan adanya ancaman kedaulatan dan keutuhan negara.

Pada umumnya, kontroversi itu berkisar antara pandangan yang pro dan kontra terhadap keterlibatan pihak asing dalam resolusi konflik dalam negeri. Bagi yang kontra, keterlibatan pihak asing dalam perundingannya hanya akan membuka ruang bagi negara lain untuk ikut campur tangan dalam urusan negara Indonesia (Djumala, 2013, hlm. 32).

Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu berhak untuk mengatur sendiri semua urusan kenegaraannya tanpa da campur tangan asing. Penetapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh secara hukum legal dan sah untuk dilaksanakan, namun akibat dari kebijakan tersebut merugikan banyak pihak, tentunya masyarakat dan membawa dampak negatif lebih dominan dibandingkan dengan dampak positifnya. Kesepakatan untuk mendatangkan mediator merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dengan GAM, hal ini merupakan salah satu alternatif solusi yang lebih elegan bagi kedua pihak. Setelah penunjukan mediator, kedua belah pihak akan duduk bersama dengan hak yang sama pula, polemik kekhawatiran di pihak pemerintah Indonesia pun muncul mengenai letak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertanyakan serta kekhawatiran adanya peluang bagi Aceh untuk benar-benar memisahkan diri dari NKRI menjadi negara yang berdaulat.

Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara tersebut. Kedaulatan juga merupakan kekuasaan penuh untuk mengatur seluruh wilayah negara tanpa campur tangan dari pemerinah negara lain (Kansil, 2008, hlm. 5-6).

Dalam latar belakang ini, penulis memiliki ketertarikan dalam mengkaji faktor-faktor penyebab dipilihnya *Crisis Management Initiative* dalam upaya penyelesaian konflik di Aceh dan dianggap berhasil dibandingkan dengan organisasi sebelumnya. Alasan pemilihan rentang waktu 2005-2012 adalah pada tahun 2005 perjanjian tersebut disepakati dan tahun 2012 adalah waktu penyusunan laporan akhir pasca penerapan kebijakan pasca perjanjian di Aceh yang dibuat langsung oleh organisasi yang bersangkutan.

Eka Auliana Pratiwi, 2019

CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA GERAKAN ACEH MERDEKA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA 2005-2012

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hal menarik di atas kemudian dapat dirinci sebagai pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam skripsi ini, antara lain : Latar belakang terbentuknya GAM yang berujung konflik dan alasan mengapa kedua belah pihak memilih *Crisis Management Initiative* sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, mengapa perundingan kedua belah pihak dilakukan diluar negeri yaitu di Finlandia yang kemudian menuai pro dan kontra di kalangan pemerintah Indonesia sendiri, mengapa lembaga ini dikatakan berhasil dalam menangani konflik yang cukup pelik antara GAM dengan Pemerintah RI, Bagaimana jalannya perundingan ini, apakah bencana alam Tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004 memiliki dampak terhadap terlaksananya perundingan atau dialog damai ini dan bagaimana dampak yang dihasilkan dari perundingan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Kajian yang dimulai dari situasi dan kondisi Indonesia sebelum tahun 2005 yang memandang asal mula konflik Aceh untuk melihat bagaimana kondisi Indonesia pada kurun waktu 2005-2012 kemudian dilanjutkan dengan penunjukan *Crisis Management Initiative* sebagai mediator yang menengahi perundingan damai antara GAM dengan pemerintah Indonesia, kemudian dilanjutkan lagi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga tersebut terkait penyelesaian konflik kedua belah pihak, bagaimana jalannya perundingan dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi di Indonesia 2005-2012. Adapun rumusan masalah yang akan diambil adalah bagaimana peranan *Crisis Management Initiative* dalam penyelesaian konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia 2005-2012?

Adapun rincian pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis untuk membatasi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh GAM terhadap konflik Aceh?
2. Apa latar belakang dipilihnya *Crisis Management Initiative* sebagai mediator penyelesaian konflik Aceh ?
3. Bagaimana proses perdamaian yang dilakukan oleh *Crisis Management Initiative* dalam penyelesaian konflik Aceh dengan Pemerintah Indonesia?
4. Bagaimana dampak dari hasil perundingan damai dalam penyelesaian konflik Aceh terhadap kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat Aceh 2005-2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Eka Auliana Pratiwi, 2019

CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA GERAKAN ACEH MERDEKA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA 2005-2012

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasar rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Menganalisis pembentukan GAM di Aceh.
2. Mendeskripsikan latar belakang dipilihnya *Crisis Management Initiative* sebagai mediator penyelesaian konflik Aceh.
3. Mendeskripsikan proses perdamaian yang dilakukan oleh *Crisis Management Initiative* dalam penyelesaian konflik Aceh dengan Pemerintah Indonesia?
4. Menganalisis dampak dari hasil perundingan damai dalam penyelesaian konflik Aceh terhadap kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat Aceh 2005-2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai sebuah penelitian karya ilmiah sehingga dapat meningkatkan kemampuan penulis untuk membuat karya tulis ilmiah dikemudian hari. Secara umum, penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum diantaranya sebagai berikut :

1. Memperkaya khasanah penulisan sejarah diplomasi di Indonesia mengenai konflik internal, khususnya yang terjadi di Provinsi Aceh beserta upaya penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi pendokumentasian untuk menambah pemahaman pembacamengenai konflik Aceh dan menjadi pelajaran agar konflik internal tidak muncul lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
3. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peserta didik SMA/MA/SMK Sederajat dalam menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI) sesuai dengan KD 4.1 kelas XII.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Penulisan Karya Ilmiah berupa skripsi harus memiliki struktur organisasi agar lebih tersusun secara sistematis, untuk membuat struktur organisasi maka penyusunan skripsi ini didasarkan pada panduan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia

tahun 2017. Tujuan dari adanya struktur organisasi skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran isi dari setiap bab, dimulai dari urutan penulisan dan keterkaitan setiap bab dalam bentuk sebuah kerangka skripsi yang utuh. Struktur organisasi skripsi terdiri dari lima bab, diantaranya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi, rumusan masalah yang dirinci dalam beberapa poin sebagai pertanyaan penelitian dan disertai juga dengan tujuan penelitian dan penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teoritis, pada bab ini penulis menjelaskan konsep-konsep atau teori-teori yang menunjang dalam proses penhkJajian terhadap permasalahan yang diambil. Selanjutnya juga akan dijelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dan menyajikan daftar literatur yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penulisan skripsi. Konsep-konsep dan teori yang relevan dan sesuai dengan pembahasan karya ilmiah agar lebih mudah memahami pembahasan pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, diantaranya berupa metode penulisan dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Metode penulisan karya ilmiah disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2016 agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan formal penulis. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah juga dijabarkan dalam bab ini, metode penelitian yang dijelaskan meliputi tahapan-tahapan penelitian yang dimulai dari persiapan hingga penyelesaian penelitian dan dijelaskan secara rinci, hal ini akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian agar lebih terstruktur dan sistematis.

Bab IV Peranan *Crisis Management Initiative* dalam Penyelesaian Konflik antara GAM dengan Pemerintah Indonesia 2005-2012. Dalam bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat. Selain itu juga akan menjelaskan data-data yang sudah dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber yang sebelumnya sudah melewati tahapan kritik dan verifikasi terlebih dahulu. Data-data yang sudah didapatkan kemudian dijelaskan dalam

bentuk tulisan yang baik dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, bab ini merupakan bab terakhir dari karya tulis ini yang berisi inti sari dari tulisan berupa gambaran-gamabaran umum yang menjelaskan hasil penelitian dari awal hingga akhir sebagai jawaban dari rumusan masalah. Rekomendasi ditujukan untuk menjelaskan manfaat skripsi ini dalam dunia pendidikan.